

ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2015-2018

Indrati Siswa¹; Grisvia Agustin²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang Jalan Semarang 5, Malang 65145

E-mail : indrati.siswa.1604326@students.um.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

E-mail : grisvia.agustin.fe@um.ac.id

diterima: 15/5/2020; direvisi: 02/9/2020; diterbitkan: 26/9/2020

Abstract: Financial inclusion is a process of extending guarantees of ease of access and financial services without constraints that are the right of the whole community, especially in vulnerable groups that are weak and low-income. With the public being able to access banking services that are easy, affordable, safe, and according to their needs, it will improve the welfare of the community. Increased financial inclusion is expected to encourage an increase in the Human Development Index. This study aims to determine how the effect of financial inclusion on the Human Development Index in Indonesia by using the dimensions of penetration, the dimensions of availability, and the dimensions of usability as an independent variable and the Human Development Index as the dependent variable. This study uses a descriptive quantitative approach with panel data regression analysis of 34 provinces in Indonesia in 2015-2018. The results of the analysis show that partially the penetration and usability dimensions have a significant positive effect on the Human Development Index in Indonesia. While the dimensions of availability have a significant negative effect on the Human Development Index in Indonesia. Simultaneously the three dimensions of financial inclusion have a significant effect on the Human Development Index in Indonesia.

Keywords: *Dimensions of Financial Inclusion, Financial Inclusion, Human Development Index.*

PENDAHULUAN

Sektor keuangan merupakan salah satu urat nadi perekonomian nasional (Mukhlis, 2015). Oleh sebab itu, sektor keuangan memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Peran penting lembaga keuangan yaitu melalui fungsi intermediasi untuk mendorong pengentasan kemiskinan, pertumbuhan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan tercapainya stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014). Peran penting lembaga keuangan harus disertai dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat pada lembaga keuangan. Sehingga diperlukan kemudahan akses bagi masyarakat agar dapat terlibat didalamnya. Kesulitan akses masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang rendah, produk layanan

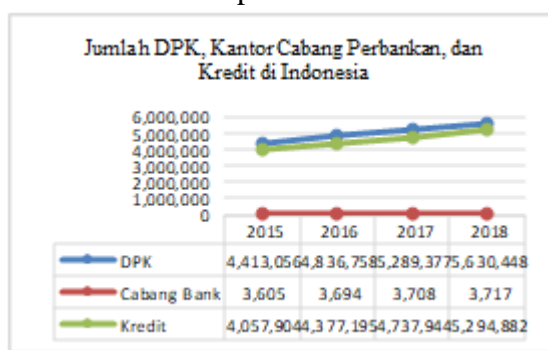
jasa keuangan yang kurang sesuai dengan kebutuhan, kurangnya edukasi terkait layanan keuangan, serta jarak yang cukup jauh antara bank dan tempat tinggal. Dengan demikian muncul pemikiran untuk menerapkan strategi inklusi keuangan guna mendorong kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang belum menikmati layanan keuangan, sehingga dapat terjadi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Bank Indonesia, 2014).

Inklusi keuangan telah menjadi bahasan penting dalam dunia internasional. Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang berisi kerangka kerja dan implementasi pelaksanaan kegiatan inklusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan survei terkait inklusi keuangan di

Indonesia. Pada tahun 2013 inklusi keuangan di Indonesia sebesar 59,7%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 67,8% pada tahun 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Adapun tingkat inklusi keuangan dapat digambarkan melalui jumlah Dana Pihak Ketiga, kantor cabang perbankan, dan kredit.

Gambar 1. Jumlah Dana Pihak Ketiga, Kantor Cabang Perbankan, dan Kredit di

Indonesia pada 2015-2018



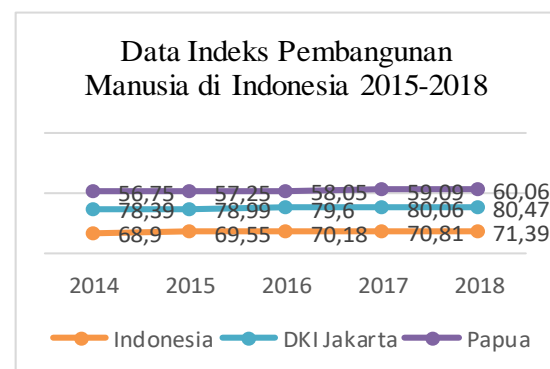
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Selain dari survei yang dilakukan oleh OJK, gambar tersebut juga menunjukkan peningkatan inklusi keuangan melalui peningkatan jumlah DPK, kantor cabang perbankan, dan jumlah kredit pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan inklusi keuangan di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam setiap faktor yang mempengaruhinya.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan produktif (Badan Pusat Statistik, 2014). Maka selain dari sektor keuangan dan perbankan, pembangunan perekonomian juga perlu untuk memperhatikan aspek sumber daya manusia. Inklusi keuangan dinilai dapat memberikan berbagai manfaat diantaranya meningkatkan perekonomian, mendukung tercapainya stabilitas sistem keuangan, mengurangi lembaga keuangan non bank yang seolah bertindak sebagai bank, memberikan kontribusi bagi pertumbuhan

perekonomian lokal dan nasional yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Bank Indonesia, 2013). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus dalam melihat keberhasilan membangun kualitas hidup manusia.

Gambar 2. Data IPM Indonesia 2015-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasar gambar tersebut, dapat diketahui bahwa dari tahun 2015-2018 IPM di Indonesia selalu mengalami peningkatan, baik secara nasional maupun daerah. Mulai pada tahun 2015 sebesar 69,55% hingga pada tahun 2018 sebesar 71,39%. Dengan IPM berturut-turut tertinggi selama tahun 2015-2018 diduduki oleh provinsi DKI Jakarta dan terendah provinsi Papua. Terjadi ketimpangan dalam IPM masing-masing provinsi. Ketimpangan tersebut dapat disebabkan karena berbagai faktor seperti perbedaan letak geografis, ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, serta perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan daerah. Adanya inklusi keuangan diharapkan mampu mengurangi ketimpangan yang terjadi dan meningkatkan IPM secara masing-masing provinsi maupun nasional.

Kajian mengenai keterkaitan antara inklusi keuangan dengan IPM telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun terdapat perbedaan

dalam temuan penelitian, umumnya hanya menguji inklusi keuangan dan IPM secara umum. Seperti dalam Sarma dan Pais (2011) menemukan bahwa tingkat pembangunan manusia dan inklusi keuangan memiliki korelasi positif yang kuat dan signifikan. Adapun penelitian Sarma (2012) karena inklusifitas sistem keuangan harus dievaluasi sepanjang beberapa dimensi, maka inklusi keuangan mengikuti pendekatan multidimensi sekaligus membangun Indeks Inklusi Keuangan. Pendekatan tersebut mirip dengan pendekatan yang digunakan oleh UNDP (United Nation Development Programme) untuk perhitungan beberapa indeks pembangunan terkenal seperti Human Development Index, Human Poverty Index, Gender Development Index, dan sebagainya. Untuk dapat mengukur inklusi keuangan, tergantung ketersediaan data pada waktu dan tingkat agregasi ekonomi yang berbeda seperti desa, provinsi, dan negara. Penelitian ini mengukur indeks inklusi keuangan berbagai negara pada tahun 2004-2010. Inklusi keuangan dapat dilihat melalui tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi, ketersediaan, dan kegunaan. Dalam Raza (2019) menunjukkan bahwa inklusi keuangan merupakan aspek penting dari pembangunan ekonomi. Terdapat hubungan positif antara inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi. Peningkatan inklusi keuangan dapat menyebabkan peningkatan pembangunan ekonomi. Berdasar hasil penelitian, jumlah rekening bank (per 1.000 penduduk dewasa) dan jumlah cabang bank (per 100.000 orang) memiliki hubungan positif dengan IPM. Namun antara jumlah anjungan tunai mandiri per 1.000 km² (persen) dan IPM menunjukkan hubungan yang negatif. Sebaliknya dalam Irsyadinnas (2019) dengan menggunakan analisis regresi data panel 14 provinsi di Indonesia,

menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Sementara variabel kredit, jumlah nasabah dan jumlah pengguna Alat Pembayaran Menggunakan Kartu berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasar perbedaan hasil penelitian yang dijelaskan di atas, penelitian ini mengkaji ulang dan lebih mendalam keterkaitan antara inklusi keuangan melalui dimensi penyusunnya dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Artikel ini disusun ke dalam lima bagian. Bagian kedua berisi tinjauan pustaka menjelaskan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu terkait inklusi keuangan dan Indeks Pembangunan Manusia. Bagian ketiga berkaitan dengan metode penelitian yang menjelaskan sumber data, pengukuran, dan model analisis yang digunakan. Bagian keempat berupa hasil dan pembahasan. Kemudian terakhir bagian kelima berisikan kesimpulan dan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa negara pada seluruh dunia menyadari akan pentingnya keberadaan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan sebuah proses yang menjamin adanya kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dalam sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi (Sarma, 2012). Inklusi keuangan merupakan hak setiap individu untuk mendapatkan akses dan layanan yang penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya (Bank Indonesia, 2014). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan merupakan suatu proses memperluas jaminan kemudahan atas akses dan layanan jasa keuangan tanpa adanya hambatan yang menjadi hak seluruh masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan yang lemah dan berpenghasilan rendah. Adanya

inklusi keuangan dinilai dapat meningkatkan pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan pilihan masyarakat, dengan jumlah yang banyak dan dinamis. Terdapat tiga hal yang paling mendasar dalam konsep pengembangan pilihan manusia, yaitu memiliki umur panjang dan sehat (a long and healthy life), memperoleh pendidikan (knowledge), dan aksesibilitas terhadap kebutuhan hidup layak (decent standard of living) (Badan Pusat Statistik, 2014). Pembangunan manusia dapat dilihat melalui IPM. IPM merupakan indeks untuk mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, dengan mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro, 2011).

Dalam teori human capital, menyebutkan bahwa manusia memerlukan akses ke dalam lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit untuk melakukan usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas diri. Kredit tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang produktif yang nantinya hasil dari kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai biaya pendidikan sehingga seseorang bisa memperoleh pekerjaan dengan bayaran yang baik, biaya kesehatan, maupun pengeluaran lainnya. Selain akses kredit, manusia juga bisa memanfaatkan tabungan maupun investasi. Meningkatkan nilai tabungan dan investasi dapat mendorong perekonomian, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas standar hidup masyarakat (Mankiw, 2014).

Adanya keterkaitan antara inklusi keuangan dan IPM telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian sebelumnya. Kuri & Laha (2011) dengan analisis komparatif dan person correlation dapat

disimpulkan tingkat inklusi keuangan secara luas mengikuti pola yang sama seperti peringkat IPM. Temuan serupa oleh Gupta (2014) menganalisis inklusi keuangan di 28 negara bagian, terdapat hubungan antara inklusi keuangan dan pengembangan manusia yang menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan dan indeks pembangunan manusia memiliki korelasi positif satu sama lain. Dalam Azwar (2017) dengan metode Index for Syariah Financial Inclusion (ISFI) yang dikembangkan dari Sarma (2012) dan metode Product Moment Coefficient of Correlation menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara inklusi keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Temuan serupa oleh Wang'oo (2008) mengemukakan terdapat hubungan korelasi positif antara inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi, peningkatan inklusi keuangan mengarah pada peningkatan pembangunan ekonomi. Berdasar uji regresi yang dilakukan menunjukkan jumlah rekening bank (per 1000 populasi orang dewasa) dan jumlah cabang bank (per 100.000 orang) memiliki hubungan positif dengan IPM. Namun antara jumlah kredit dan IPM terdapat hubungan yang negatif.

Berbeda dengan temuan sebelumnya, hasil penelitian oleh Irsyadinna (2019) dengan menggunakan analisis regresi data panel 14 provinsi di Indonesia, menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, semakin tinggi DPK maka akan menurunkan tingkat IPM. Sementara variabel kredit, jumlah nasabah dan jumlah pengguna Alat Pembayaran Menggunakan Kartu berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan semakin meningkatnya kredit, jumlah nasabah dan pengguna APMK maka akan semakin meningkatkan IPM di Indonesia. Inklusi keuangan cenderung memiliki hubungan dan pengaruh yang positif, tetapi hasil

yang didapatkan akan berbeda tergantung periode dan kondisi perekonomian pada negara yang diteliti (Hidayanti,2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan publikasi oleh Badan Pusat Statistik dari tahun 2015-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan data dalam bentuk data panel berupa 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2015-2018. Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang dan waktu, dimana dalam data panel, unit individu, sama disurvei dari waktu ke waktu (Gujarati,2012). Dengan 3 variabel independen yaitu dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan, dan dimensi kegunaan, serta satu variabel dependen yaitu IPM.

Pengukuran dimensi inklusi keuangan dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Dimensi Penetrasi (d_1)

$$d_1 = \frac{\text{(Dana Pihak Ketiga)}}{\text{(Populasi penduduk dewasa)}} \times 1.000$$
2. Dimensi Ketersediaan (d_2)

$$d_2 = \frac{\text{(Kantor cabang perbankan)}}{\text{(Populasi penduduk dewasa)}} \times 100.000$$
3. Dimensi Kegunaan (d_3)

$$d_3 = \frac{\text{(Jumlah kredit)}}{\text{(PDRB)}} \times 100.000$$

Untuk menyamakan rentang data pada setiap variabelnya maka dilakukan transformasi data. Bentuk fungsional model regresi dalam penelitian ini adalah Semi-Log dengan model Lin-Log. Model Lin-Log merupakan model di mana transformasi hanya dilakukan pada variabel bebas, sedangkan variabel terikat berbentuk linear (Gujarati, 2006). Persamaan analisis regresi data panel penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{it}(1) + \beta_2 \ln X_{it}(2) + \beta_3 \ln X_{it}(3) + e_{it}$$

Dengan pemanfaatan software E-views dalam pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan menentukan model terbaik mana yang akan digunakan, Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model melalui uji Chow dan uji Hausman. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji signifikansi.

Dalam uji Chow memiliki ketentuan, apabila nilai Prob. Cross-section Chi square $< \alpha$ 5% atau 0.05 maka memilih Fixed Effect Model. Apabila nilai Prob. Cross-section Chi square $> \alpha$ 5% atau 0.05 maka memilih Common Effect Model. Selanjutnya untuk uji Hausman, dengan ketentuan apabila nilai Prob. cross-section Chi Square $< \alpha$ 5% atau 0.05 maka memilih Fixed Effect Model. Apabila nilai Prob. cross-section Chi Square $> \alpha$ 5% atau 0.05 maka memilih Random Effect Model. Adapun untuk menjawab penelitian, digunakan pengujian asumsi klasik. Dengan uji F, untuk mengetahui dan melihat apakah model regresi variabel independen yang diteliti secara simultan ataupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Uji t digunakan untuk mengetahui dan melihat apakah model regresi variabel independen yang diteliti berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen atau tidak. Kemudian koefisien determinasi, untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Dalam uji Chow nilai probabilitas sebesar 0.0000 atau < 0.05 sehingga model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect. Selanjutnya dalam uji Hausman, nilai probabilitas sebesar 0.0000 atau < 0.05 ,

sehingga model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect. Hasil Fixed Effect Model seperti dalam Tabel 1

Tabel 1: Hasil Fixed Effect Model dari Pemrosesan Data Penelitian Menggunakan Program Eviews

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PENETRASI	4.491394	0.601205	7.470653	0.0000
KETERSEDIAAN	-2.700984	1.191483	-2.266910	0.0256
KEGUNAAN	3.837314	0.578571	6.632397	0.0000
C	14.74206	5.927618	2.487013	0.0146
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.995610	Mean dependent var	69.46882	
Adjusted R-squared	0.994014	S.D. dependent var	4.107273	
S.E. of regression	0.317775	Akaike info criterion	0.771638	
Sum squared resid	9.997128	Schwarz criterion	1.564051	
Log likelihood	-15.47136	Hannan-Quinn criter.	1.093654	
F-statistic	623.7171	Durbin-Watson stat	1.927735	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 1 memperlihatkan hasil model regresi terbaik, dengan persamaan $Y_{it} = 14.74206 + 4.491394LnX1_{it} - 2.700984LnX2_{it} + 3.837314LnX3_{it} + e_{it}$. Nilai konstanta sebesar 14.74206 menunjukkan apabila variabel independen yang diteliti yaitu dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan, dan dimensi kegunaan dinyatakan dalam jumlah nol, maka akan terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 14.74206 poin. Nilai koefisien dimensi penetrasi sebesar 4.491394, artinya apabila nilai dimensi penetrasi mengalami peningkatan sebesar 1% akan meningkatkan IPM 34 provinsi di Indonesia sebesar 4.491394 poin. Nilai koefisien dimensi ketersediaan -2.700984, artinya apabila nilai dimensi ketersediaan mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM 34 provinsi di Indonesia sebesar 2.700984 poin. Nilai koefisien dimensi kegunaan 3.837314, artinya apabila nilai dimensi kegunaan mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM 34 provinsi di Indonesia sebesar 3.837314 poin.

Hasil Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Nilai probability sebesar 0.000012. Nilai tersebut < 0.05 , maka dapat disimpulkan data terdistribusi tidak normal. Akan tetapi karena jumlah data

yang digunakan sebesar 136 atau lebih dari 30 maka dapat diasumsikan data terdistribusi normal (Gujarati, 2010).

Uji Multikolinieritas Semua kombinasi antar variabel bebas kurang dari 0.8, maka pada data panel ini tidak terjadi multikolinearitas dan lolos uji asumsi klasik multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas, Nilai probabilitas dimensi penetrasi, ketersediaan, dan kegunaan > 0.05 . Sehingga dapat disimpulkan tidak terkena masalah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi, Diketahui nilai DW sebesar 1.927735, selanjutnya melihat tabel DW dengan ketentuan $k=3$ dan $n=136$. Hasilnya dalam Tabel 2 sebagai berikut

DI	du	4-du	4-dl
1.6751	1.7652	2.2348	2.2349

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan nilai sebesar 1.927735 terletak diantara nilai du dan 4-du. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar variabel.

Uji Signifikansi, Uji F, Nilai F statistik atau F hitung sebesar 623.7171 sedangkan F tabel sebesar 2.67 dengan sig. F sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari alpha 0.05, maka secara simultan variabel bebas dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan, dan dimensi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara umum provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dalam layanan jasa perbankan. Peningkatan tersebut terjadi karena upaya dari pemerintah dan peran serta berbagai pihak yang bekerjasama dalam meningkatkan layanan perbankan seperti mengeluarkan kebijakan maupun program-program yang mendukung masyarakat untuk lebih mudah memperoleh layanan. Inklusi keuangan bertujuan untuk menarik masyarakat unbanked pada sistem layanan keuangan formal sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengakses

layanan keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, kredit, ataupun asuransi (Hannig dan Jensen, 2010). Dengan meningkatnya masyarakat yang dapat menikmati layanan jasa dan produk keuangan formal, akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat dinilai melalui beberapa faktor, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran yang dilakukan. Temuan ini sejalan dengan Sha'ban (2019) yang menyatakan meningkatkan inklusi keuangan sangat penting untuk mendorong pembangunan dan dapat membawa banyak manfaat terkait dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam hasilnya juga menyebutkan inklusi keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB per kapita, pembangunan manusia, dan penggunaan internet.

Uji t, Pada variabel dimensi penetrasi dengan nilai Prob. < alpha 0.05 yaitu sebesar 0.0000 dan nilai koefisien yang bernilai positif, maka variabel dimensi penetrasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap IPM. Setiap peningkatan dimensi penetrasi akan meningkatkan nilai IPM pada masing-masing provinsi di Indonesia. Dalam dimensi penetrasi yang diwakilkan oleh Dana Pihak Ketiga per 1.000 populasi penduduk, dan DPK dapat berupa tabungan, giro, maupun deposito. Penggunaan produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi akan membantu masyarakat dalam mengelola konsumsi dan investasi termasuk investasi pada bidang pendidikan maupun bidang kesehatan (Lagarde, 2014). Dengan adanya masyarakat yang menggunakan produk tabungan, bank dapat menyalurkannya kembali pada masyarakat untuk kegiatan ekonomi produktif melalui kredit. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ifiomu (2016) yang menyatakan bahwa deposito tetap menjadi penggerak utama dalam beroperasinya perbankan sekaligus

memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang diprosikan oleh IPM. Deposito merupakan salah satu komponen dalam DPK. Maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa DPK memberikan pengaruh positif bagi IPM.

Variabel dimensi ketersediaan dengan nilai Prob. < alpha 0.05 yaitu sebesar 0.0256 dan nilai koefisien yang bernilai negatif, maka disimpulkan variabel dimensi ketersediaan jumlah kantor cabang perbankan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM. Saat ini ketersediaan layanan perbankan tidak hanya terpaku pada keberadaan kantor cabang perbankan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat layanan dapat dilakukan melalui adanya teknologi keuangan seperti internet banking guna meningkatkan inklusi keuangan. Dengan demikian setiap adanya penurunan jumlah kantor cabang, maka akan meningkatkan nilai IPM di Indonesia. Bagaimanapun keberadaan kantor cabang bank masih diperlukan. Namun dengan adanya pengurangan kantor cabang perbankan dan memanfaatkan layanan perbankan melalui teknologi akan memberikan dampak yang baik bagi pihak bank maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ofosu & Ababio (2019) menyatakan masyarakat yang lebih maju mempromosikan lebih banyak inklusi keuangan melalui penggunaan ATM untuk menyimpan, meminjam, atau melakukan pembayaran. Selain itu menyebutkan juga bahwa telekomunikasi modern, terutama ponsel dan internet digunakan untuk layanan keuangan telah menjadi keharusan bagi terciptanya peningkatan inklusi keuangan. Untuk memperluas jangkauan ketersediaan layanan perbankan dapat memanfaatkan adanya financial technology. Bank dapat meningkatkan efisiensi melalui pengurangan jumlah kantor cabang. Sekaligus sebagai upaya dalam menekan biaya operasional perusahaan dan akhirnya meningkatkan laba, serta akan berimbas pada turunnya suku bunga yang

diberlakukan pada bank tersebut. Financial technology di Indonesia diantaranya adalah program peer to peer lending. Peer to peer lending sebagai solusi peningkatan inklusi keuangan, yang selanjutnya peningkatan inklusi keuangan diharapkan turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahadiyan dan Sari, 2019).

Variabel dimensi kegunaan dengan nilai Prob. < alpha 0.05 yaitu sebesar 0.0000 dan nilai koefisien yang bernilai positif, maka variabel dimensi kegunaan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap IPM. Peningkatan jumlah kredit akan meningkatkan nilai IPM pada masing-masing provinsi di Indonesia. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan kredit guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Temuan ini serupa dengan penelitian Irsyadinna (2019) menyatakan bahwa kredit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Memiliki akses ke kredit memungkinkan untuk merencanakan pengeluaran dan rencana pendidikan yang memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik dan melalui kredit pula suatu negara dapat mengembangkan semangat kewirausahaan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha (Blando, 2013). Peningkatan dalam penyaluran kredit yang dilakukan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui IPM.

Uji Koefisien Determinasi, Uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dependen. Nilai R-squared sebesar 0.995610 atau 99.5610 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM dijelaskan sebesar 99.56 persen oleh variabel dimensi penetrasi, ketersediaan, kegunaan, dan sisanya sebesar 0.44 persen dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diluar persamaan regresi ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel dimensi penetrasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Apabila variabel dimensi penetrasi meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan variabel IPM. Dengan meningkatnya produk-produk layanan perbankan yang digunakan oleh masyarakat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun pengeluaran. Adapun variabel dimensi ketersediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Menurunnya variabel dimensi ketersediaan akan meningkatkan variabel IPM. Hal ini terjadi dikarenakan ketersediaan layanan perbankan tidak selamanya hanya dilihat berdasar jumlah kantor cabang. Perlunya perluasan layanan perbankan yang dapat menjangkau semua kalangan dengan mudah dan cepat maka ketersediaan layanan perbankan dapat memanfaatkan *financial technology*. Selanjutnya dimensi kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, apabila variabel dimensi kegunaan meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan variabel IPM. Semakin meningkatnya layanan kredit yang dimanfaatkan oleh masyarakat, maka semakin banyak pula masyarakat yang dapat melakukan kegiatan ekonomi yang produktif. Secara simultan dimensi penetrasi, ketersediaan, dan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap IPM di 34 provinsi Indonesia. Secara umum provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dimensi inklusi keuangan dari tahun 2015-2018. Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan perbankan. Dengan meningkatnya masyarakat yang dapat menikmati layanan jasa dan produk keuangan formal, maka akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada temuan penelitian, sebaiknya perbankan memperluas

jangkauan layanan keuangan formal pada seluruh lapisan masyarakat, memberikan informasi terkait jasa dan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan teknologi keuangan yang mudah diakses agar masyarakat dapat memanfaatkan dan memaksimalkan layanan keuangan dengan baik, sehingga terjadi peningkatan pada inklusi keuangan di Indonesia. Adapun Bank Indonesia bersama seluruh pihak terkait seperti pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan pihak terkait lainnya harus bekerja sama mendukung dan mengupayakan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah pelosok yang akses layanan keuangan formalnya masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Iskandar U. 2017. *Analisis Empiris Inklusifitas Keuangan Syariah Indonesia*. Jurnal BPPK. 10 (1). 1-21.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: BPS. Diunduh dari <https://www.bps.go.id> diakses pada 28 September 2019.
- Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia. Diunduh dari www.bi.go.id diakses pada 3 September 2019.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D.N. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2 Edisi 5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Gupta, Anurag, et al. 2014. *Financial Inclusion and Human Development: A State-Wise Analysis From India*. International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom Vol. II, Issue 5, 2014.
- Hannig, Alfred., Jansen, Stefan. 2010. *Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues*. Asian Development Bank Institute (ADBI) Working Paper series
- Hidayanti, Annisa. 2018. *Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2017*. Malang: Jurnal Ilmiah
- Ifiomu, E.P. 2016. *A Decade of Microfinance Bank's Operation and Economic Development in Nigeria*. Research Journal of Finance and Accounting, 7 (5), 152-161.
- Irsyadinna, A. 2019. *Analisis Peran Inklusi Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia Tahun 2012-2017*. Malang: Jurnal Ilmiah
- Kuri, Pravat Kumar, and Arindam Laha. 2011. *Financial Inclusion and Human Development in India: An Inter-State Analysis*. Indian Journal of Human Development 5 (1).
- Lagarde, C. 2014. *Empowerment Through Financial Inclusion*. The International Forum for Financial Inclusion. Mexico. June 16, 2014.
- Mankiw, N.Gregory., Quah, E., & Wilson, P. 2014. *Pengantar Ekonomi Makro: Edisi Asia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mukhlis, Imam. 2015. *Ekonomi Keuangan dan Perbankan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ofosu, Josephine., Ababio Mensah, et al. 2019. *Financial Inclusion and Human Development In Frontier Countries*. International Journal Financial Economic.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Data Statistik Perbankan Indonesia*. Diunduh dari <https://www.ojk.go.id> diakses pada 28 November 2019
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*

- (Revisit 2017). Diunduh dari www.ojk.go.id diakses pada 3 September 2019
- Rahadiyan, I., dan Sari, A. R. 2019. *Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Defendonesia. 4(1): 18-28.
- Raza, Muhammad Subtain, et al. 2019. *Determining The Nexus Between Financial Inclusion and Economic Development In Pakistan*. Journal Of Money Laundering Control. 22 (1).
- Sarma, Mandira dan Jesim, Pais. 2011. *Financial Inclusion and Development*. Journal of International Development. 23:613-628.
- Sarma, Mandira. 2012. *Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness*. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development.
- Sha’ban, Mais, et al. 2019. *Cross Country Variation In Financial Inclusion: A Global Perspective*. The European Journal Of Finance
- Soetiono, Kusumaningtuti., Setiawan, Cecep. 2018. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P. Dan S. C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas* Jakarta: Erlangga
- Wang’oo, E.W. 2008. *The Relationship Between Financial Inclusion and Economic Development In Kenya*. University Of Nairobi